

**BAB II**

**UPAYA PERTAHANAN HEGEMONI AMERIKA SERIKAT**

**MENGHADAPI DOMINASI TIONGKOK**

Amerika Serikat dikenal sebagai negara hegemoni dan *super power* hingga saat ini, tetapi di pertengahan hegemoni Amerika Serikat, Tiongkok muncul sebagai saingan dan ancaman bagi Amerika Serikat. Sehingga, pada periode Presiden Barack Obama terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya dengan menghambat dominasi Tiongkok. Oleh karena itu, bab ini akan membahas dan menganalisis terkait beberapa upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok, yaitu pada sektor ekonomi dan militer pada periode Presiden Barack Obama dari 2008 hingga 2016.

Penulisan bab ini akan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Pertama*, strategi dan dominasi Tiongkok; *Kedua*, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode Barack Obama; *Ketiga*, upaya-upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoni yang akan difokuskan pada pembahasan di bidang ekonomi dan militer. Kemudian, pada akhir pembahasan akan disimpulkan kembali secara garis besar, dari semua yang telah dibahas pada bab II ini dan pentingnya data-data yang telah didapatkan.

**1. Strategi dan Dominasi Tiongkok**

Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah mengalami perubahan secara signifikan. Pada seabad silam, Tiongkok merupakan korban dari imperialisme Barat, Jepang serta kekuasaan-kekuasaan asing lainnya. Sehingga, hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi, sosial, budaya.

(Widyahartono, 2004, hal. 6) Tetapi, pada permulaan abad ke-21, Tiongkok sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia, memiliki sekitar 1,3 Miliar penduduk dan perekonomian yang terus meningkat dengan rata-rata sekitar 10% pertahun (Mittler, 2011, hal. 138).

Tiongkok mempunyai strategi dengan mengambil beberapa tindakan untuk menggambarkan dirinya sendiri sebagai anggota komunitas dunia yang bertanggung jawab, memainkan perannya dengan baik. Hal ini, mengakibatkan adanya istilah ‘perkembangan damai’ yaitu berarti bahwa Tiongkok pada akhirnya memperoleh peran sebagai kekuatan regional dan global yang pernah hilang pada pertengahan abad ke-19 (Mittler, 2011, hal. 3).

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Tiongkok untuk menggambarkan dirinya sendiri, yaitu dalam sektor ekonomi: *Pertama*, dengan bergabungnya Tiongkok ke dalam *World Trade Organization* (WTO), sehingga membuat citra Tiongkok semakin baik di mata dunia. Hal ini dikarenakan Tiongkok dianggap dapat membuka dirinya dari proteksionisme dan semakin berkomitmen dalam perdagangan internasional dengan mematuhi kebijakan dan peraturan yang ada di dalamnya. Tiongkok mulai bergabung ke dalam *World Trade Organization* (WTO) sejak 11 Desember 2001 hingga saat ini (WTO, 2001).

*Kedua*, adanya investasi yang telah diberikan oleh Tiongkok terhadap kawasan Afrika, seperti: Nigeria, Angola, Botswana, Zambia dan Afrika Selatan, di mana investasi tersebut merupakan investasi asing terbesar yang ada di Afrika. Sehingga, hal ini membuat hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi tegang. Kemudian, Amerika Serikat juga sempat merasa tersaingi oleh Tiongkok

karena Tiongkok menerapkan strategi ini terlebih dahulu dibandingkan Amerika Serikat sendiri, di mana strategi Tiongkok ini lebih bagus dan menjadi selangkah lebih maju dari Amerika Serikat (Patnistik, 2010).

Dengan adanya investasi tersebut, telah membuat Tiongkok mempunyai peluang pasar yang lebih besar dan bisa lebih leluasa untuk mendominasi beberapa sektor penting di Afrika. Tiongkok melakukan investasi pada sektor kebutuhan dasar dan beberapa bidang lainnya, yaitu seperti: pengadaan air bersih, listrik dan infrastruktur jalan. Selain menanamkan investasi, Tiongkok juga menjalin hubungan perdagangan secara bilateral dengan Afrika Selatan, yang sebelumnya pada tahun 2000 hanya US\$10,6 Miliar, kemudian pada tahun 2008 naik menjadi US\$106,8 Miliar (Patnistik, 2010).

*Ketiga*, Tiongkok juga telah menggantikan posisi Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat sudah kurang memperhatikan Amerika Latin. Sehingga, hal ini membuat Tiongkok semakin bebas untuk memberikan kontribusinya terhadap Amerika Latin serta membuat Amerika Latin beralih kepada Tiongkok yang juga mempunyai peran yang sangat besar dalam pekeonomian global (Santibañes, 2009, hal. 17-21).

Peran Tiongkok di wilayah Amerika Latin dapat menjadikan ancaman bagi ekonomi Amerika Serikat di masa depan. Hubungan antara Amerika Latin dan Tiongkok telah memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak, khususnya Amerika Latin. Di mana, Tiongkok telah menjadi negara lima besar yang mengimpor barang ke Amerika Latin. Hal ini terbukti bahwa beberapa negara Amerika Latin telah mengimpor beberapa barang dari Tiongkok, yaitu seperti: Brazil sebanyak \$8,7 Miliar, Chili sebanyak \$3,7 Miliar, Argentina sebanyak \$3,3

Miliar, Meksiko sebanyak \$2,1 Miliar serta Peru sebanyak \$1,5 Miliar (Sullivan, 2005, hal. 1-7). Kemudian, pada tahun 2013, volume perdagangan antara Amerika Latin dan Tiongkok menjadi semakin meningkat, yang sebelumnya hanya \$12 Miliar menjadi \$275 Miliar (Reid, 2015).

Selain itu, Tiongkok juga telah banyak menanamkan *Foreign Direct Investment* (FDI) ke beberapa negara Amerika Latin, seperti: Brazil, Argentina, Meksiko, Chile, Venezuela dan Peru. Sehingga, meningkatnya hubungan kerjasama ekonomi antara kedua negara ini dapat mengancam kepentingan dan otoritas Amerika Serikat di wilayah Amerika Latin. Tiongkok juga telah menggunakan Amerika Latin sebagai alat untuk melawan dominasi Amerika Serikat serta membentuk aliansi negara dunia ketiga dari beberapa negara di Amerika Latin yang bertentangan dengan nilai dan kepentingan Amerika Serikat (Sullivan, 2005, hal. 1-7).

*Keempat*, dalam bidang militer, yaitu adanya beberapa *peacekeeper* yang telah ditempatkan oleh Tiongkok ke berbagai negara. Sehingga, hal ini membuat Pemerintah Tiongkok mempunyai otoritas dalam mengendalikan wilayah-wilayah lainnya. Di mana, pada tahun 2011, Tiongkok telah menugaskan *peacekeeper* sebanyak 2.044 orang ke 12 tempat yang mengalami konflik. Sehingga, hal ini membuat Tiongkok mempunyai kontrol dan pengaruh yang lebih besar dalam meredam dan mengatasi konflik (Perlez, 2012).

Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memberikan bantuan yang besar dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, pada tahun 2013, Tiongkok juga memberikan bantuan sebanyak 2.181, yang terdiri dari pasukan tentara, polisi dan ahli militer ke dalam

misi perdamaian PBB. Di mana, beberapa pasukan tersebut telah tersebar dari Negara Mali, Libanon dan Siprus (Campbell-Mohn, 2015).

Kontribusi Tiongkok dalam perdamaian PBB tersebut, dapat dikatakan sebagai sebuah strategi Tiongkok agar dapat mencapai beberapa tujuannya, yaitu: *Pertama*, agar dapat memperkuat dan melakukan pembaharuan dalam kemampuan militernya. *Kedua*, untuk membentuk dan memperluas relasi Tiongkok agar dapat memperoleh dukungan secara global dan mendapatkan suara yang lebih banyak di PBB. *Ketiga*, Tiongkok mempunyai peran yang semakin luas dalam dunia global serta dapat membangun citra dan reputasinya dalam ranah internasional sebagai negara yang peduli untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian (Pauley, 2018)

Tiongkok mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam bidang militer. Di mana, Tiongkok juga memerlukan untuk menyeimbangi kekuatan ekonominya dengan kekuatan militer (Perlez, 2012). Sehingga, hal ini membuat Tiongkok menaikkan anggaran militer, di mana dari tahun 2008 hingga 2017 pengeluaran belanja militer Tiongkok semakin meningkat. Pengeluaran belanja militer Tiongkok pada tahun 2017 merupakan pengeluaran belanja militer tertinggi bagi Tiongkok, yaitu sebesar US\$228 Miliar. Sebelumnya, pada tahun 1989 hanya sebesar US\$19.320 Juta yang merupakan pengeluaran belanja militer terendah bagi Tiongkok (Economics, Trading Economics, 2017).

## **2. Hubungan antara AS-Tiongkok pada Periode Barack Obama**

Tiongkok memiliki arti penting bagi Amerika Serikat, salah satunya ditunjukkan oleh Barack Obama melalui kunjungan kenegaraan. Di mana, pada tahun 2009, Tiongkok menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Barack

Obama, setelah resmi menjabat Presiden Amerika Serikat. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Tiongkok telah menjalin hubungan diplomatik selama 40 tahun, dan hubungan kedua negara ini menjadi semakin dekat dengan beberapa kerjasama (Li, 2016). Pentingnya kerjasama dengan Tiongkok ini juga ditekankan oleh Barack Obama melalui pernyataannya sebagai berikut:

*“The relationship between the United States and China is the most important bilateral relationship of the 21<sup>st</sup> century”* (Li, 2016).

Tiongkok merupakan salah satu relasi yang penting bagi Amerika Serikat dan telah memberikan banyak manfaat terhadap Amerika Serikat, terbukti bahwa pada periode Barack Obama, terdapat beberapa manfaat yang diberikan oleh Tiongkok terhadap Amerika Serikat (USBC, 2017, hal. 4-5). Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar 1, di bawah ini:



Sumber: (USBC, 2017, hal. 5)

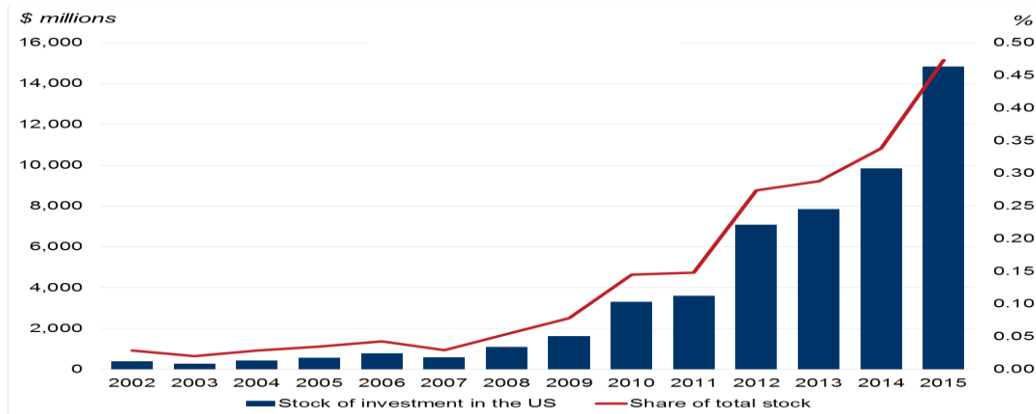
**Gambar 1 : Perdagangan AS-Tiongkok Sebagian Besar Menguntungkan Bisnis dan Konsumen AS**

Berdasarkan gambar di atas, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan Amerika Serikat melalui kerjasama dengan Tiongkok. *Pertama*, pada tahun 2015,

Amerika Serikat dapat meningkatkan lapangan pekerjaan sebanyak 2,6 juta di beberapa industri yang telah dibentuk oleh Tiongkok di Amerika Serikat. Sehingga, hal ini menyebabkan GDP Amerika Serikat juga meningkat hingga mencapai US\$216 Miliar. *Kedua*, pada tahun 2015, barang dan jasa milik Amerika Serikat telah dibeli oleh Tiongkok sebanyak US\$165 Miliar, di mana nominal tersebut senilai dengan 7,3 persen dari seluruh ekspor Amerika Serikat dan sekitar 1 persen dari total produksi Amerika Serikat. Sehingga, dari pembelian barang dan jasa oleh Tiongkok ini juga telah berkontribusi untuk mendukung 1,8 juta pekerjaan baru di Amerika Serikat (USBC, 2017, hal. 4).

*Ketiga*, pada tahun 2015, Amerika Serikat telah memperoleh keuntungan \$56.500 dan menghemat anggaran perdagangan sebanyak \$850 karena impor Tiongkok terhadap Amerika Serikat yang murah. Sehingga, hal ini dapat menyebabkan para konsumen membeli barang dengan harga yang murah. *Keempat*, banyaknya nilai ekspor Amerika Serikat terhadap Tiongkok, khususnya dalam bidang transportasi, bisnis dan jasa keuangan. Hal ini terbukti dengan pada tahun 2014, ekspor Amerika Serikat terhadap Tiongkok telah menghasilkan sebanyak \$6,7 Miliar dan \$7,1 Miliar pada tahun 2015 (USBC, 2017, hal. 4). Selain itu, dengan impor Tiongkok yang murah, Amerika Serikat juga dapat menghemat anggaran dan biaya untuk melakukan sebuah perdagangan serta dapat mengurangi adanya inflasi (USBC, 2017, hal. 5).

*Kelima*, adanya *Foreign Direct Investment* (FDI) Tiongkok terhadap Amerika Serikat, di mana dari tahun 2002 hingga tahun 2015 mengalami peningkatan yang semakin drastis. Seperti yang ditunjukkan pada grafik 2, sebagai berikut:



Sumber: (USBC, 2017, hal. 11)

### Grafik 1 : *Foreign Direct Investment (FDI) Tiongkok terhadap AS 2002-2015*

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2015, Tiongkok telah menginvestasikan sebanyak \$14,8 Juta terhadap Amerika Serikat. Sehingga, investasi Tiongkok ini dapat mendukung 104.000 pekerjaan di Amerika Serikat serta menghasilkan GDP sebanyak \$10,8 Miliar (USBC, 2017, hal. 10-11).

Di samping terdapat beberapa peluang dan keuntungan yang telah didapatkan Amerika Serikat dari hasil kerjasamanya dengan Tiongkok, hal tersebut juga dapat menjadi sebuah ancaman bagi Amerika Serikat. Seperti yang dikatakan oleh Huntington, di mana ia telah mengilustrasikan dan memprediksi terkait kebangkitan Tiongkok dengan melihat pertumbuhan ekonominya (Friedberg, 2005, hal. 20-21). Hal ini dikatakan oleh Huntington bahwa:

*“That China too will undoubtedly be moving into such a phase in the coming decades”* (Friedberg, 2005, hal. 20).

Dan hal serupa didukung dengan pernyataan John Mearsheimer sebagai berikut:



*"China's power continues to grow, "China, like all previous potential hegemon, [will] be strongly inclined to become a real hegemon" (Friedberg, 2005, hal. 20).*

Amerika Serikat harus selalu waspada terkait kebangkitan Tiongkok dari abad 20 hingga saat ini, di mana strategi Tiongkok dikhawatirkan akan lebih kreatif dan inovatif di masa depan, sehingga akan dapat menyaingi hegemoni Amerika Serikat (Friedberg, 2005, hal. 20-21). Hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak menutup kemungkinan akan menjadi sebuah saingan (Li, 2016). Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Tiongkok mengalami perubahan yang sangat signifikan karena adanya sains dan teknologi yang semakin berkembang dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sangat pesat, sehingga dapat dinilai sebagai ancaman bagi Amerika Serikat (Li, 2016). Di mana, Barack Obama pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat harus menyadari bangkitnya negara-negara berkembang dan dampaknya terhadap tatanan dunia baru, seperti perkataannya, yaitu:

*"Must be aware of the rise of emerging economies and its impact on the new world order" (Li, 2016).*

Oleh karena itu, semakin kompleksnya hubungan antara kedua negara ini, maka terdapat sebagian opini publik Amerika Serikat menjadi kurang percaya terhadap Tiongkok dan menyebabkan perselisihan. Hal ini dikarenakan Amerika Serikat mempunyai sistem pemerintahan yang bersifat *check and balances*, yaitu sebuah mekanisme untuk mengatur otoritas eksekutif seorang Presiden yang bertujuan untuk mengontrol dan mengatur keselarasan antara satu badan dengan yang lainnya, mencegah sistem otoriter (Radu, 2010, hal. 244), mempertahankan

hegemoni serta mengatasi berbagai permasalahan politik yang tengah dihadapi oleh Amerika Serikat (Dingli, 2017).

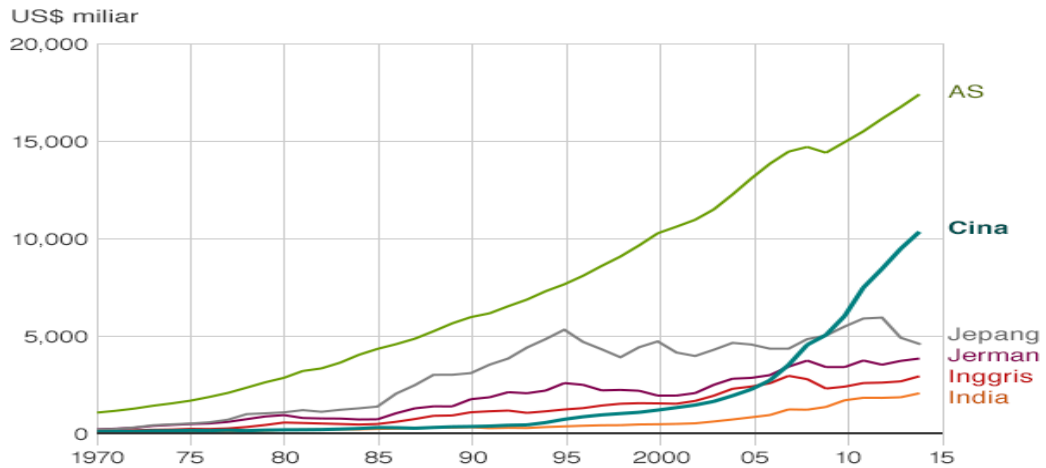
### **3. Upaya–Upaya Amerika Serikat dalam Mempertahankan Hegemoni**

Dalam menghadapi dominasi perekonomian Tiongkok, Amerika Serikat telah melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan hegemoninya. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu: *pertama*, dilakukan dengan cara ekonomi, *kedua*, militer. Kedua hal ini akan dijelaskan secara rinci pada sub bab berikut.

#### **3.1. Ekonomi**

Beberapa kebijakan serta upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa anggota di dunia ini terkadang menjadikan citra Amerika Serikat sebagai negara hegemoni mempunyai nilai yang positif dan negatif. Sehingga, Amerika Serikat harus berhati-hati dalam menentukan suatu kebijakan serta waspada dalam melakukan segala upaya apapun terhadap suatu negara tertentu. Hal ini dikarenakan, pandangan masyarakat selalu berbeda terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Amerika Serikat tersebut, khususnya bagi negara yang mempunyai standar dan kapasitas yang berkualitas dan mempunyai potensi untuk menyaingi Amerika Serikat, seperti halnya Tiongkok.

Tiongkok telah mendahului negara maju lainnya, baik itu dalam bidang ekonomi maupun militer. Salah satunya, dari segi ekonomi, menurut *Gross Domestic Product* (GDP), Tiongkok dari tahun 1970 hingga 2014, telah menduduki peringkat kedua setelah Amerika Serikat dan telah mengungguli negara-negara maju lainnya, yaitu: Jepang, Jerman dan Inggris, seperti yang akan dijelaskan pada grafik dibawah ini:



Sumber: (BBC, 2015)

**Grafik 2: GDP dalam US\$ tahun 1970-2014**

Dengan adanya kebangkitan Tiongkok yang sangat pesat, khususnya dalam bidang ekonomi, maka Amerika Serikat melakukan beberapa upaya untuk mempertahankan hegemoninya dalam menghadapi dominasi perekonomian Tiongkok. Tiongkok menjadi tidak percaya terhadap Amerika Serikat, karena terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat yang dianggap dapat mengancam perpolitikan dan perekonomian Amerika Serikat (Li, 2016). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Tiongkok adalah *'Pivot to Asia'* pada periode Barack Obama, sehingga menyebabkan Tiongkok beranggapan bahwa *'Pivot to Asia'* sebagai upaya pertahanan Amerika Serikat untuk mencegah dan menghambat perekonomian Tiongkok (Li, 2016).

Amerika Serikat mempunyai dominasi yang sangat kuat dalam bidang ekonomi. Sehingga, Amerika Serikat bebas untuk menerapkan kebijakan apapun sesuai dengan keinginannya. Oleh karena itu, Amerika Serikat menerapkan kebijakan *'Pivot to Asia'*, atau *'Poros Asia'*, yaitu suatu kebijakan luar negeri

Amerika Serikat pada masa Obama yang dirasa sangat penting pada abad 21, khususnya untuk memulihkan perekonomiannya pasca krisis 2008 (Initiative, 2009).

Dalam kebijakan *Pivot to Asia* ini, Obama memfokuskan kawasan Asia Pasifik yang mempunyai pengaruh penting untuk memperoleh kepentingan dalam bidang militer, sosial, keamanan, ekonomi maupun politik. Kemudian, kebijakan ini juga dibuat karena untuk mencegah kekuatan Tiongkok yang telah mulai berkembang untuk menyaingi Amerika Serikat (Quinn, 2015, hal. 3-18). Kawasan Asia Pasifik mempunyai peran yang sangat penting (House W. , 2011). Di mana, hal ini dipertegas dengan perkataan Obama dalam pidatonya terhadap Parlemen Australia yang menyatakan bahwa:

*“Here, we see the future. As the world’s fastest-growing region -- and home to more than half the global economy -- the Asia Pacific is critical to achieving my highest priority, and that’s creating jobs and opportunity for the American people. With most of the world’s nuclear power and some half of humanity, Asia will largely define whether the century ahead will be marked by conflict or cooperation, needless suffering or human progress”* (House W. , 2011).

Kemudian, implementasi dari ‘*Pivot to Asia*’ adalah pembentukan *Trans Pacific Partnership* (TPP) yang dibentuk hanya untuk menguntungkan anggota negara yang ada di dalamnya saja. Salah satu tujuan utama dari aktivitas perjanjian perdagangan tersebut, yaitu dapat menghambat aktivitas *Free Trade Agreement* (FTA) Tiongkok serta membuat pengaruh ekonomi Tiongkok menjadi lemah di wilayah regional maupun global. Hal ini dikarenakan, Amerika Serikat

sebagai negara yang memprakarsai TPP, justru tidak melibatkan Tiongkok sebagai anggota di dalam perjanjian dagang tersebut (Sutter, 2013, hal. 8).

TPP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas secara multilateral yang telah dibuat oleh Amerika Serikat pada periode Presiden Barack Obama dengan melibatkan 11 negara dari kawasan Asia Pasifik, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Chili, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru, Selandia Baru, Singapura, Vietnam (House T.W., 2015).

Dalam perjanjian TPP ini terdapat beberapa peraturan untuk melakukan aktivitas perdagangan secara mudah antara satu negara dengan negara lainnya, salah satunya yaitu dengan menghilangkan lebih dari 18.000 pajak dari beberapa produk barang, jasa, manufaktur, pertanian, otomotif, teknologi dan informasi. Di mana, Amerika Serikat akan menghilangkan tarif dari beberapa produk barang yang telah diekspor '*Made in America*' terhadap anggota negara TPP. Selain itu, terdapat peraturan terkait standarisasi ketenagakerjaan, lingkungan, investasi asing, hak kekayaan intelektual serta beberapa isu perdagangan lainnya (House T.W., 2015).

Selain mempermudah aktivitas perdagangan, TPP ini dibuat untuk kepentingan Amerika Serikat dengan beberapa tujuan, yaitu: meningkatkan perekonomian Amerika Serikat, meningkatkan ekspor, memberikan pekerjaan yang layak bagi warga domestik Amerika Serikat dengan gaji yang sesuai serta mendukung para petani, pekerja dan pengusaha golongan kecil maupun menengah (USTR, t.th.).

TPP merupakan sebuah perjanjian perdagangan bebas yang telah diprakarsai oleh Amerika Serikat. Sehingga, secara tidak langsung, telah memperbolehkan Amerika Serikat untuk membuat peraturan dalam perdagangan bebas di kawasan Asia Pasifik secara bebas pada abad 21. Amerika Serikat akan menjadi lebih leluasa dalam membuat peraturan yang akan disepakati dan akan membuat peraturan yang dirasa menguntungkan bagi Amerika Serikat (House T.W., 2015). Hal ini dapat didukung dengan adanya sebuah pernyataan dalam *website Obama White House*, yaitu:

*“With the TPP, we can rewrite the rules of trade to benefit America’s middle class. Because if we don’t, competitors who don’t share our values, like China, will step in to fill that void”*  
(USTR, t.th.).

TPP mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan aktivitas perdagangan bebas dan juga dapat menempatkan Amerika Serikat sebagai pusat rezim liberalisasi. Oleh karena itu, dengan adanya *Trans Pacific Partnership* (TPP), Amerika Serikat akan menjadi lebih kuat dalam hegemoninya pada lingkup internasional (Biegon, 2017, hal. 1).

Selain TPP sebagai upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan hegemoninya dalam menghadapi dominasi perekonomian Tiongkok, Amerika Serikat juga melakukan beberapa upaya lainnya, yaitu dengan menggunakan pengaruh dan perannya yang sangat besar dalam beberapa Organisasi Internasional, salah satunya yaitu *World Trade Organization* (WTO). WTO merupakan Organisasi Internasional yang bergerak dalam sektor ekonomi global, di mana Amerika Serikat mempunyai kendali yang sangat besar di dalamnya. Oleh karena itu, Amerika Serikat dapat mempengaruhi dan mengontrol secara

komprehensif dalam berbagai permasalahan di dunia perdagangan (Heywood, 2013, hal. 755-774).

Pada periode Barack Obama, Amerika Serikat bersikeras untuk meningkatkan perekonomian domestik, baik itu dengan meningkatkan ekspor maupun dengan memprioritaskan peraturan perdagangan secara ketat (USTR, 2014). Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan hegemoni Amerika Serikat dengan cara memproteksi barang-barang produksinya yang ada dalam negeri (USTR, 2015). Hal ini didukung dengan perkataan Barack Obama, dalam pidatonya pada 24 Januari 2012, yang mengatakan bahwa:

*“I will go anywhere in the world to open new markets for American products. And I will not stand by when our competitors don’t play by the rules. We’ve brought trade cases against China at nearly twice the rate as the last administration – and it’s made a difference. Over a thousand Americans are working today because we stopped a surge in Chinese tires. But we need to do more. It’s not right when another country lets our movies, music, and software be pirated. It’s not fair when foreign manufacturers have a leg up on ours only because they’re heavily subsidized”* [President Barack Obama, 1/24/2012] (USTR, 2015).

Pada periode Barack Obama, Amerika Serikat telah menerapkan kebijakan luar negeri yang sangat ketat terkait penegakan hukum perdagangan Amerika Serikat (USTR, 2015). Hal tersebut dapat terlihat dengan perkataan Presiden Barack Obama dalam pidatonya pada 19 Mei 2015, yang mengatakan bahwa:

*“I have made rigorous trade enforcement a central pillar of U.S. trade policy, and we have moved aggressively to protect American workers and to improve labor laws and working conditions with trading partners across the globe”* [President Barack Obama, 5/19/2015] (USTR, 2015).

Terdapat beberapa kasus yang telah diajukan oleh Amerika Serikat terhadap beberapa negara, yaitu seperti: Tiongkok, India, Indonesia dan Argentina. Tetapi, kasus yang paling sering diajukan oleh Amerika Serikat adalah permasalahan terhadap Tiongkok. Amerika Serikat mempunyai peran yang sangat kuat untuk menekan pasar Tiongkok. Hal ini terbukti bahwa terdapat 11 kasus yang dibawa oleh Amerika Serikat untuk melawan Tiongkok ke *World Trade Organization* (WTO) dan dari 11 kasus tersebut, terdapat 8 kasus yang telah dimenangkan oleh Amerika Serikat (USTR, 2015).

Sehingga, dengan penegakan hukum perdagangan secara ketat tersebut, maka Amerika Serikat sering memenangkan beberapa permasalahan yang telah diajukan ke WTO. Kemenangan Amerika Serikat juga dapat mendukung beberapa kalangan, seperti pekerja, pebisnis dan petani yang telah mendapatkan keuntungan sebanyak miliaran dolar, di mana setiap dolarnya dapat mendukung sebanyak 5.800 pekerjaan yang ada di Amerika Serikat. Selain itu, pada periode Barack Obama selama 5 tahun berturut-turut, ekspor *‘Made in America’* juga mengalami peningkatan secara drastis. Sehingga, hal tersebut dapat berkontribusi dalam mendukung 11,7 juta pekerjaan yang ada di Amerika Serikat dengan gaji yang tinggi (USTR, 2015).

Terdapat beberapa permasalahan Amerika Serikat dengan Tiongkok, tetapi dalam sub bab ini, hanya akan membahas dua permasalahan, yaitu: *Pertama*, pada



September 2009, Amerika Serikat telah mengajukan sebuah kasus terhadap Tiongkok di WTO. Di mana, Presiden Barack Obama telah memutuskan untuk menerapkan tarif tambahan pada ban Tiongkok. Hal ini dikarenakan adanya impor ban dari Tiongkok yang sangat meningkat untuk mobil dan truk. Sehingga, hal ini membuat pabrik ban domestik ditutup, membuat produksi ban Amerika Serikat menurun serta membuat warga Amerika Serikat telah kehilangan pekerjaan mereka. Kemudian, pada tahun 2011, Amerika Serikat telah berhasil memenangkan kasus tersebut. Hal ini dilakukan oleh Amerika Serikat untuk melindungi aktivitas perdagangannya serta menyelesaikan gangguan pasar domestik yang terjadi di Amerika Serikat (USTR, 2015).

*Kedua*, pada 23 Mei 2014, Amerika Serikat kembali menggugat Tiongkok terkait pelanggaran ketentuan tarif yang telah ditentukan oleh *World Trade Organization* (WTO), di mana Tiongkok tidak dapat konsekuen dalam mengimplementasikan aktivitas perdagangannya (VOA, 2014). Tiongkok menerapkan tarif yang melanggar aturan perdagangan internasional dalam mengenakan biaya *Anti-Dumping Duties* (ADs) dan *Countervailing Duties* (CVDs) terhadap mobil buatan Amerika Serikat serta beberapa kendaraan *Sport-Utility Vehicles* (SUVs) (USTR, 2014).

*Countervailing Duties* (CVDs) adalah pajak impor yang dapat dikenakan pada barang-barang tertentu agar dapat menghindari *dumping*. Kemudian, *Anti-Dumping Duties* (ADs) merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh suatu negara pengimpor agar dapat menghindari diskriminasi dari negara pengeksport, yang dapat menjual suatu produk dengan harga lebih murah dari harga pasar domestik negara pengimpor (WTO, 2018).

Dengan memenangkan kasus tersebut, Pemerintah Amerika Serikat dapat memberikan banyak keuntungan bagi para pekerjanya, sebanyak 850.000 orang (VOA, 2014). Kemudian, untuk menanggapi kasus sengketa ini, seorang perwakilan dari *United States Trade Representative* (USTR), yang bernama Michael Froman, telah menyatakan sebuah pernyataan. (USTR, 2014) Michael Froman menyatakan bahwa:

*“... that the United States has prevailed in a WTO dispute challenging China’s unjustified use of trade remedies. Each time, a WTO panel of experts has made clear that China had no basis whatsoever for imposing duties on American goods. The message is clear: China must follow the rules, just like other WTO Members. USTR will keep pressing for China to change its trade remedies practices that unfairly restrict U.S. exports”*  
(USTR, 2014).

Dari pernyataan di atas, telah jelas bahwa Amerika Serikat dapat memenangkan beberapa kasus yang telah diajukannya terhadap Tiongkok. Kemudian, apabila Tiongkok melanggar peraturan perdagangan dan melakukan tindakan secara tidak adil terhadap Amerika Serikat yang dapat menghambat aktivitas perdagangan Amerika Serikat, maka USTR tidak akan tinggal diam dan akan segera melakukan tindakan secara tegas terhadap Tiongkok (USTR, 2014).

Kemudian, selain TPP dan pengaruhnya yang besar dalam WTO, terdapat pendekatan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara, yaitu: *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) yang merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan hegemoninya. Hal ini juga mengingat bahwa terdapat anggota negara TPP dari Asia Tenggara, yaitu: Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Sehingga, negara-negara Asia Tenggara merupakan mitra penting bagi Amerika

Serikat dalam ‘menyeimbangkan’ kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Asia Pasifik (Makinen, 2016).

Amerika Serikat dan ASEAN telah menjalin hubungan diplomatik selama 40 tahun. Salah satu upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan citranya sebagai negara hegemoni di kawasan Asia Tenggara adalah dengan kehadiran Presiden Barack Obama pada *US-ASEAN Summit* yang diselenggarakan di Malaysia. Pada pertemuan ini Amerika Serikat dan ASEAN telah membahas terkait beberapa kerja sama dan program di antara kedua belah pihak untuk jangka panjang (House, 2015). Selain itu, Amerika Serikat juga pernah menjadi tuan rumah *US-ASEAN Summit* untuk pertama kalinya yang telah diadakan di Sunnylands, Rancho Mirage, Amerika Serikat. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Amerika Serikat untuk mendiskusikan beberapa hal, khususnya bidang militer (Makinen, 2016).

Pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam bidang ekonomi di kawasan Asia Tenggara dapat ditunjukkan dengan adanya pemberian dukungan Amerika Serikat terhadap program yang ada di ASEAN, yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dukungan Amerika Serikat tersebut, yaitu berupa upaya untuk memberikan bantuan di beberapa bidang, seperti memfasilitasi aktivitas perdagangan dan standar harmonisasi serta meningkatkan kualitas dan kapabilitas Usaha Kecil Menengah (UKM) di negara-negara ASEAN (House, 2015).

Sehingga, pada tahun 2014, Amerika Serikat dan ASEAN telah menghasilkan volume perdagangan sebesar US\$250 Miliar pada barang maupun jasa. Kemudian, FDI yang telah diberikan oleh Amerika Serikat terhadap ASEAN sebesar US\$226 Miliar, di mana jumlah ini merupakan investasi terbesar yang

pernah diberikan oleh Amerika Serikat dibandingkan negara-negara lainnya. Sehingga, hubungan antara kedua pihak ini dapat menciptakan peluang bisnis dan pekerjaan baru (House, 2015).

### **3.2. Militer**

Amerika Serikat mempunyai kekuatan militer yang sangat kuat, sehingga dengan kekuatannya tersebut, Amerika Serikat mempunyai peran dan pengaruh yang sangat besar dalam bidang militer. Hal ini terbukti dengan adanya 700 pangkalan militer yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat dan telah tersebar ke lebih dari 100 negara yang ada di dunia ini (Heywood, 2013, hal. 756). Kemudian, pada tahun 2015, yaitu periode Presiden Barack Obama, Amerika Serikat mempunyai kendali yang sangat kuat dalam bidang militer. Hal ini dapat dibuktikan dengan berhasilnya Amerika Serikat dalam membentuk kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)*.

JCPOA merupakan sebuah kesepakatan tentang pembatasan program dan aktivitas nuklir di Iran. Dalam JCPOA ini, Iran telah menyetujui kesepakatan tersebut dengan beberapa negara di dalamnya, salah satunya yaitu Amerika Serikat sebagai negara yang memprakarsai kesepakatan ini. Di mana, anggota negara di dalam kesepakatan JCPOA ini, yaitu: Inggris, Prancis, Rusia, Jerman dan Tiongkok (BBC, 2018). Sebagai salah satu negara anggota yang ada di dalam JCPOA ini, Tiongkok juga ikut mendorong dan mendukung agar kesepakatan ini dapat diimplementasikan dengan sebaik mungkin. Salah satunya, yaitu dengan adanya kepemilikan hak veto dalam Dewan Keamanan PBB, Tiongkok membebaskan Iran dari sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai imbalan Iran yang telah bersedia menyetujui JCPOA (VOA, 2018).

Kemudian, adanya pendekatan Amerika Serikat terhadap kawasan Asia Tenggara, yaitu: *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) yang merupakan salah satu strategi untuk mempertahankan hegemoninya. Hal ini juga mengingat bahwa terdapat anggota negara TPP dari Asia Tenggara, yaitu: Brunei, Malaysia, Singapura dan Vietnam. Sehingga, negara-negara Asia Tenggara merupakan mitra penting bagi Amerika Serikat dalam ‘menyeimbangkan’ kebijakan luar negerinya terhadap kawasan Asia Pasifik (Makinen, 2016).

Amerika Serikat dan ASEAN telah menjalin hubungan diplomatik selama 40 tahun. Salah satu upaya Amerika Serikat untuk mempertahankan citranya sebagai negara hegemoni di kawasan Asia Tenggara adalah dengan kehadiran Presiden Barack Obama pada *US-ASEAN Summit* yang diselenggarakan di Malaysia. Pada pertemuan ini Amerika Serikat dan ASEAN telah membahas terkait beberapa kerja sama dan program di antara kedua belah pihak untuk jangka panjang (House, 2015). Selain itu, Amerika Serikat juga pernah menjadi tuan rumah *US-ASEAN Summit* untuk pertama kalinya yang telah diadakan di Sunnylands, Rancho Mirage, Amerika Serikat. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Amerika Serikat untuk mendiskusikan beberapa hal, khususnya bidang militer (Makinen, 2016).

Pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam bidang militer dapat ditunjukkan dengan setiap tahunnya militer Amerika Serikat berlatih dengan militer milik anggota negara ASEAN. Militer Amerika Serikat telah mengajarkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas militer, bertukar pengalaman dan berbagi pengetahuan dan keahliannya dalam bidang militer. Kemudian, Amerika Serikat juga membantu dalam melawan terorisme dan kejahatan

transnasional, non proliferasi dan perlucutan senjata. Selain itu, Asia Tenggara yang merupakan wilayah rentan terhadap alam bencana, maka militer Amerika Serikat telah menyediakan bantuan terhadap ASEAN, yaitu bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana melalui *Humanitarian Assistance and Disaster Relief* (HADR) (Hang, 2018).

Dengan besarnya peran dan pengaruh militernya terhadap dunia, tidak menutup kemungkinan bahwa kekuatan militer Amerika Serikat tidak memiliki saingan dan akan terus bertahan sepanjang masa. Hal ini dikarenakan, Tiongkok selain menjadi kompetitor Amerika Serikat dalam bidang ekonomi, Tiongkok juga mempunyai kemampuan serta kapabilitas dalam menandingi kemampuan militer Amerika Serikat. Hal ini terbukti bahwa Amerika Serikat merasa terancam dengan kebangkitan Tiongkok pada awal abad 21, yang juga telah mempunyai kekuatan militer. Amerika Serikat telah menyatakan bahwa Tiongkok merupakan ‘pesaing strategis’ yang dapat mengancam tujuan serta kepentingan Amerika Serikat, khususnya dalam ranah internasional (Gao, 2018).

Amerika Serikat memang sangat khawatir atas kekuatan militer yang dimiliki oleh Tiongkok pada abad 21 saat ini. Tetapi, di salah satu sisi, Tiongkok menyatakan bahwa negaranya tidak mempunyai niat untuk menyaingi dan menggantikan peran Amerika Serikat dalam kancah internasional. Hal ini dapat didukung dengan perkataan Menteri Luar Negeri Tiongkok, yang bernama Wang Yi dalam sebuah konferensi pers yang membicarakan terkait kebijakan Luar Negeri Tiongkok, di mana ia telah menyatakan bahwa: (Gao, 2018)

*“In other words, China and the United States can be competitors, or even partners, but not rivals,” Wang said.  
“China is on a long march to modernization; it has no need or*

*intention to replace the United States' international role”*  
(Gao, 2018).

*“Some Americans allege that China will displace the United States' role in the world. This conclusion is fundamentally wrong,” Wang emphasized* (Gao, 2018).

Dari kedua pernyataan di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa Tiongkok tidak ingin meningkatkan kemampuannya militernya. Hal ini dikarenakan setiap negara akan merasa aman dan sejahtera apabila selain kemampuan ekonominya bagus, kemampuan militernya juga harus ditingkatkan. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya setiap negara ingin melindungi dan mempertahankan wilayahnya dengan kekuatan militer apabila suatu negara sudah kuat ekonominya, maka negara tersebut akan cenderung meningkatkan kekuatan militernya.

Oleh karena itu, Tiongkok ingin meningkatkan kekuatan militernya, salah satunya dengan cara meningkatkan anggaran pertahanan militer Tiongkok, maka Tiongkok akan mempunyai peran dan pengaruh yang lebih penting dalam melindungi wilayahnya, khususnya pada daerah laut mereka yang kaya akan sumber kekayaan alam. Selain itu, Pemerintah Tiongkok juga akan lebih mempunyai otoritas dalam mengendalikan wilayah-wilayah lainnya. Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2011, Tiongkok telah menugaskan *peacekeeper* sebanyak 2.044 orang ke 12 tempat yang mengalami konflik. Sehingga, hal ini membuat Tiongkok mempunyai kontrol dan pengaruh yang lebih besar dalam meredam dan mengatasi konflik (Perlez, 2012).

Selain itu, Tiongkok juga merupakan negara yang memberikan bantuan yang besar dalam operasi pemeliharaan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kemudian, pada tahun 2013, Tiongkok juga memberikan bantuan sebanyak 2.181, yang terdiri dari pasukan tentara, polisi dan ahli militer ke dalam

misi perdamaian PBB. Di mana, beberapa pasukan tersebut telah tersebar dari Negara Mali, Libanon dan Siprus (Campbell-Mohn, 2015).

Kontribusi Tiongkok dalam perdamaian PBB tersebut, dapat dikatakan sebagai sebuah strategi Tiongkok agar dapat mencapai beberapa tujuannya, yaitu: *Pertama*, agar dapat memperkuat dan melakukan pembaharuan dalam kemampuan militernya. *Kedua*, untuk membentuk dan memperluas relasi Tiongkok agar dapat memperoleh dukungan secara global dan mendapatkan suara yang lebih banyak di PBB. *Ketiga*, Tiongkok mempunyai peran yang semakin luas dalam dunia global serta dapat membangun citra dan reputasinya dalam ranah internasional sebagai negara yang peduli untuk mencegah konflik dan menjaga perdamaian (Pauley, 2018).

Keinginan Tiongkok dalam meningkatkan anggaran belanja militernya, karena Tiongkok ingin menyeimbangi dengan kekuatan ekonominya yang dimiliki hingga saat ini. Hal ini bisa didukung dengan perkataan Dennis J. Blasko, yaitu seorang mantan atase Angkatan Darat Amerika Serikat yang pernah berada di Kedutaan Amerika di Beijing. Dennis J. Blasko menulis sebuah buku berdasarkan pengalamannya, yang berjudul *'The Chinese Army Today'* dan mengilustrasikan tentang militer Tiongkok (Perlez, 2012), sebagai berikut:

*"Whatever the true numbers may be, the Chinese military has a much larger pot of cash to spend on fewer troops than it did 15 years ago, .... China's defense spending continued to be in line with its economic growth rates"* (Perlez, 2012).

Hal ini terbukti bahwa pada tahun 2012, di pertengahan persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin ketat, Tiongkok telah mengungkapkan bahwa negaranya telah meningkatkan anggaran pertahanan



militer mereka menjadi \$106 Miliar USD, di mana sebelumnya pada tahun 2011 hanya sebanyak US\$95,6 Miliar (Perlez, 2012). Kemudian, pada tahun 2017, Tiongkok juga meningkatkan anggarannya militernya sebesar 7 persen, di mana anggaran ini lebih tinggi apabila dibandingkan pada tahun 2016. Kenaikan anggaran 7 persen tersebut sebesar CNY 1,04 Triliun atau setara dengan \$151 Miliar USD. Pada 5 Maret 2017, Tiongkok juga memaparkan akan meningkatkan anggaran pertahanannya sebanyak 8,1 persen pada tahun 2018 (Security, 2018).

Tetapi, peningkatan anggaran militer yang telah dilakukan oleh Tiongkok tidak dilakukan secara transparan, di mana Tiongkok tidak memaparkan secara rinci terkait apa saja senjata yang akan dikembangkan, strategi militer serta jumlah anggaran militer tersebut (Security, 2018). Hal ini disampaikan oleh Richard A. Bitzinger sebagai seorang ahli yang mempelajari dan mendalami terkait Program Transformasi Militer di *S. Rajaratnam School of International Studies* (RSIS) serta militer Tiongkok, bahwa:

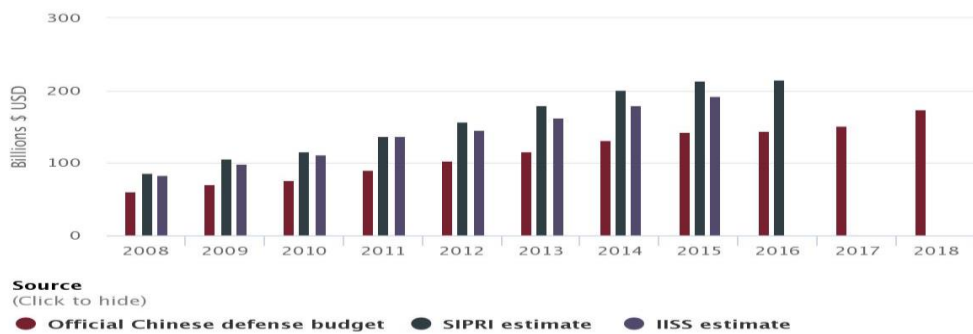
*“It’s hard sometimes to be able to get too much out of the overall budget because the Chinese aren’t very transparent. Basically they only give us a top line figure”* (CSIS, 2018).

*[The Chinese] used to say their defense budget was really low because other countries such as Japan or India were spending more on defense, but after they’ve outstripped these countries in terms of defense spending . . . they don’t want to draw too much attention to that . . . and because of that they’ve actually been revealing less information* (CSIS, 2018).

Hal ini membuat Amerika Serikat merasa khawatir akan kerahasiaan anggaran militer Tiongkok dan membuat Presiden Barack Obama meminta

transparansi atas anggaran militer yang dilakukan oleh Pemerintah Tiongkok (Perlez, 2012).

Dalam mengukur kemampuan militer suatu negara dapat dilihat dari anggaran pertahanan militernya. Salah satunya, negara Tiongkok yang mempunyai anggaran belanja pertahanan Tiongkok, dan dapat dilihat pada grafik 3, di bawah ini:

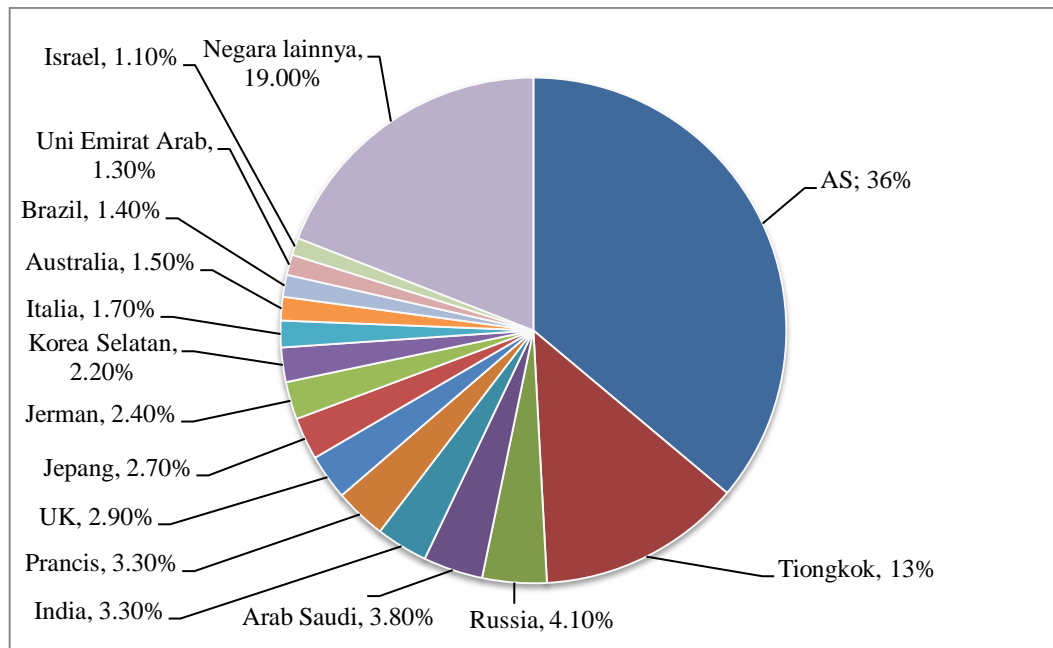


Sumber: (CSIS, 2018)

**Grafik 3 : Anggaran Belanja Pertahanan Tiongkok 2008-2018**

Berdasarkan grafik di atas, semakin meningkat anggaran militer suatu negara, maka potensi dan kemampuan pertahanan militer negara tersebut juga akan semakin bagus. Salah satu contohnya adalah negara Tiongkok yang telah memberikan anggaran terhadap pertahanan militer mereka yang semakin meningkat dari tahun 2008 hingga tahun 2018 (CSIS, 2018).

Kemudian, pada tahun 2016, *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI) memberikan data statistik terkait pengeluaran militer yang tertinggi dari 15 negara bagian yang ada di dunia, yang dapat dilihat pada grafik 4, sebagai berikut:



Sumber: (SIPRI, 2017)

**Grafik 4: Anggaran Belanja Militer dengan Pengeluaran Tertinggi dari 15 Negara Bagian di Dunia pada Tahun 2016**

Berdasarkan grafik di atas, posisi *pertama* pengeluaran militer tertinggi yaitu Amerika Serikat sebesar 36%, *Kedua*, Tiongkok sebesar 13%, *Ketiga*, Rusia sebesar 4,1%, kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya sebanyak 19% (SIPRI, 2017).

Pengeluaran militer Tiongkok pada tahun 2017 termasuk pengeluaran yang tertinggi dari tahun ke tahun, khususnya apabila dibandingkan pada tahun 1989 yang dapat dikatakan pengeluaran militer terendah bagi Tiongkok, yaitu hanya US\$19.320 Juta. Tetapi, pada tahun 2008 hingga 2017, pengeluaran militer Tiongkok semakin meningkat (Economics, 2017). Di mana, dapat dilihat pada grafik 5, sebagai berikut:



Sumber: (Economics, Trading Economics, 2017)

### Grafik 5: Pengeluaran Belanja Militer Tiongkok 2008-2017

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, pengeluaran belanja militer Tiongkok menjadi US\$228 Miliar yang sebelumnya US\$216 Miliar pada tahun 2016. Sebaliknya, pada periode yang sama pengeluaran militer Amerika Serikat semakin menurun dari tahun 2008 hingga 2017, seperti grafik 6, di bawah ini (Economics, 2017):



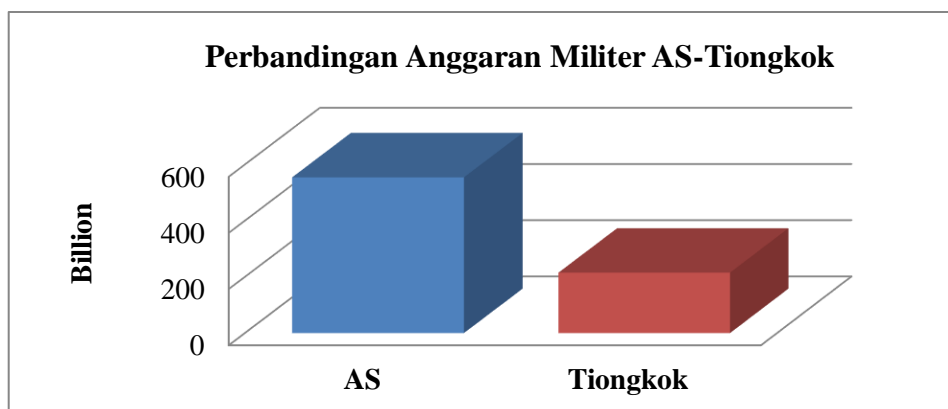
Sumber: (Economics, Trading Economics, 2017)

### Grafik 6: Pengeluaran Belanja Militer AS 2008-2017

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa pengeluaran belanja militer Amerika Serikat pada tahun 2017 turun menjadi US\$597 Miliar yang sebelumnya US\$600 Miliar pada tahun 2016. Tetapi, pada tahun 2010, pengeluaran militer

Amerika Serikat sempat berada pada posisi tertinggi, yaitu US\$768 Miliar (Economics, 2017).

Walaupun anggaran pertahanan militer Tiongkok meningkat setiap tahunnya, sedangkan Amerika Serikat semakin menurun. Tetapi, jumlah anggaran militer Amerika Serikat masih jauh lebih banyak dibandingkan Tiongkok. Dengan kenaikan anggaran militer Tiongkok, Amerika Serikat juga tidak mau kalah dengan menaikkan anggaran militernya. Kemudian, antara kedua negara ini juga telah saling mengungguli dalam sektor militer. Sektor militer ini akan dibagi menjadi empat bagian, yaitu: *pertama*, anggaran militer, *kedua*, anggaran belanja militer dari *percent of GDP*, *ketiga*, kekuatan militer berdasarkan *manpower* dan *keempat*, kekuatan militer berdasarkan *landforces* (Forces, 2016). *Pertama*, perbandingan anggaran militer antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang dapat dilihat pada grafik 7, sebagai berikut:

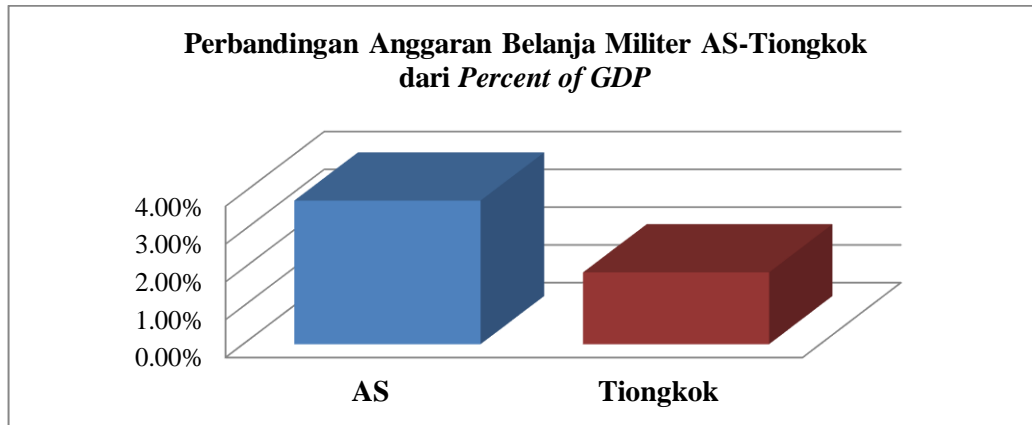


Sumber: (Forces, 2016)

**Grafik 7: Perbandingan Anggaran Militer AS-Tiongkok**

Seperti yang ditunjukkan pada grafik di atas, menjelaskan bahwa anggaran pertahanan militer Amerika Serikat mencapai US\$554,2 Miliar, di mana telah mengungguli anggaran militer milik Tiongkok sebesar US\$215 Miliar. *Kedua*,

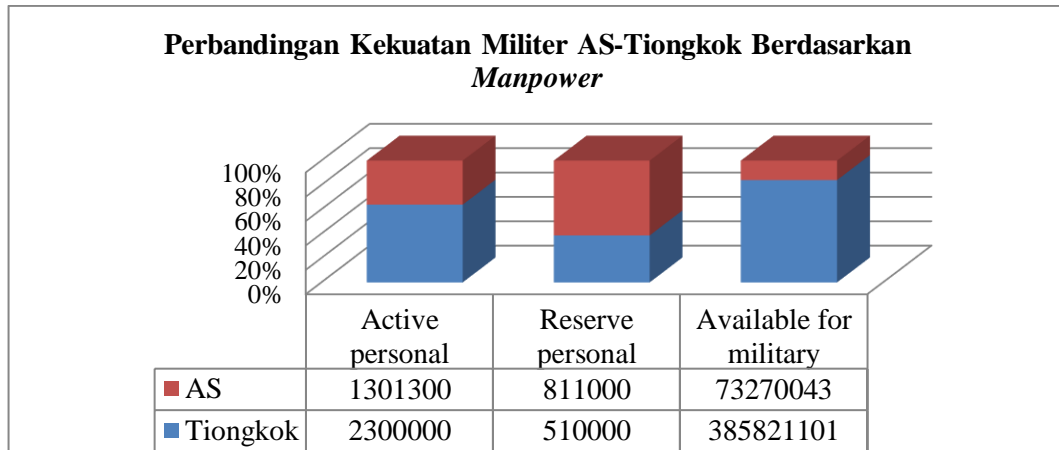
anggaran belanja militer Amerika Serikat dari *percent of GDP* yang lebih tinggi dibandingkan Tiongkok (Forces, 2016). Hal ini dapat dilihat pada grafik 8, sebagai berikut:



Sumber: (Forces, 2016)

**Grafik 8: Perbandingan Anggaran Belanja Militer AS-Tiongkok dari *Percent of GDP***

Berdasarkan grafik di atas, anggaran belanja militer milik Amerika Serikat lebih banyak, yaitu sebanyak 3,8% dari *percent of GDP*, sedangkan Tiongkok sebesar 1,9% dari *percent of GDP*. *Ketiga*, anggota militer antara kedua negara ini juga saling mengungguli antara satu dengan yang lainnya (Forces, 2016). Perbandingan kekuatan militer berdasarkan *manpower* antara kedua negara ini dapat dilihat pada grafik 9, berikut ini:

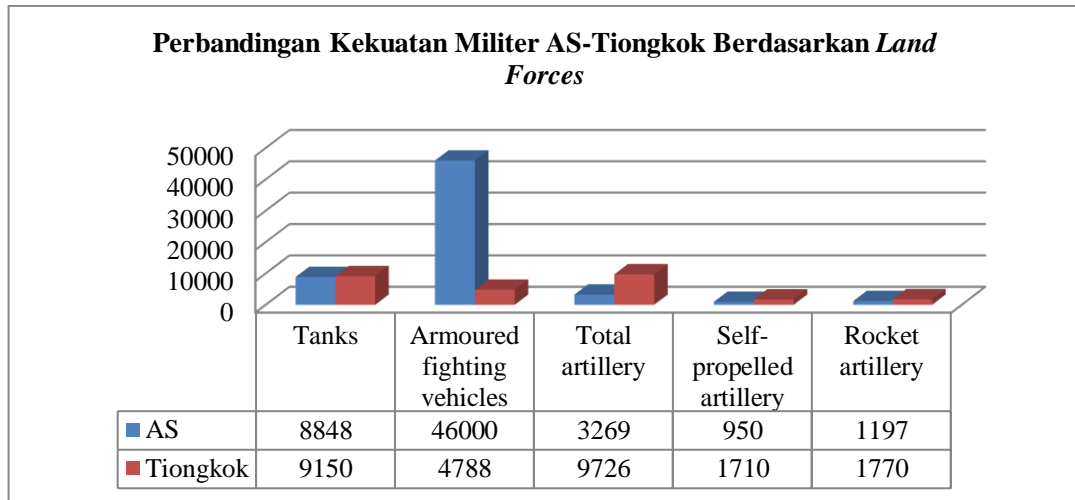


Sumber: (Forces, 2016)

**Grafik 9: Perbandingan Kekuatan Militer AS-Tiongkok Berdasarkan *Manpower***

Grafik di atas menunjukkan bahwa anggota militer aktif (*Active personal*) milik Amerika Serikat sebanyak 1.301.300 personel, sedangkan Tiongkok lebih banyak, yaitu dengan 2.300.000 personel. Kemudian, anggota cadangan militer (*Reserve personal*) Amerika Serikat lebih banyak dengan 811.000 personel, dibandingkan Tiongkok yang memiliki 510.000 personel. Selain itu, anggota militer Amerika Serikat yang tersedia (*Available for military*) sebanyak 73.270.043 personel, sedangkan Tiongkok lebih banyak dengan 385.821.101 personel (Forces, 2016).

*Keempat*, beberapa peralatan dan persenjataan militer, seperti *tanks*, *Armoured Fighting Vehicles (AFV)*, *artillery*, *self propelled artillery* serta *rocket artillery* antara kedua negara ini juga telah bersaing dan saling mengungguli antara satu dengan yang lainnya (Forces, 2016). Perbandingan kekuatan militer berdasarkan *land forces* antara kedua negara ini dapat dilihat pada grafik 10, berikut ini:



Sumber: : (Forces, 2016)

**Grafik 10: Perbandingan Kekuatan Militer AS-Tiongkok Berdasarkan *Land Forces***

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa tank (*Tanks*) milik Amerika Serikat mempunyai 8.848 buah, sedangkan Tiongkok mempunyai lebih banyak dengan 9.150 buah. Kendaraan tempur lapis baja (*Armoured Fighting Vehicles*) milik Amerika Serikat mempunyai 46.000 buah yang jauh lebih banyak dibandingkan Tiongkok hanya 4.788 buah. Artileri (*Artillery*) milik Amerika Serikat lebih sedikit dengan 3.269 buah, sedangkan Tiongkok mempunyai lebih banyak dengan 9.726 buah. Artileri lokomotif (*Self propelled artillery*) milik Amerika Serikat mempunyai 950 buah, sedangkan Tiongkok lebih banyak dengan 1.710 buah. Kemudian, Roket artileri (*Rocket artillery*) milik Amerika Serikat memiliki 1.197 buah, sedangkan Tiongkok lebih banyak dengan memiliki 1.770 buah (Forces, 2016).

Dengan demikian, dalam bab II ini telah membahas beberapa hal, yaitu: *Pertama*, strategi dan dominasi Tiongkok; *Kedua*, hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada periode Barack Obama; dan yang paling penting



adalah poin *Ketiga*, yaitu upaya-upaya Amerika Serikat dalam mempertahankan hegemoninya dalam menghadapi dominasi Tiongkok. Dalam bab II ini juga telah menjelaskan secara rinci bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat sebagai negara hegemoni dan *super power* untuk mempertahankan hegemoninya pada periode Presiden Barack Obama 2008 hingga 2016 dalam menghadapi dominasi Tiongkok, yaitu dengan memfokuskan pada sektor ekonomi dan militer. Kemudian, beberapa upaya yang telah ditulis dalam pembahasan ini juga didukung oleh beberapa data yang relevan, sehingga dapat mendukung argumen dan analisis.

Kemudian, pembahasan selanjutnya yang akan ditulis pada bab III adalah tentang konsep hegemoni yang telah diprakarsai oleh Antonio Gramsci. Di mana, konsep hegemoni yang akan digunakan dalam penulisan ini sesuai dengan apa yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pada bab II. Di dalam bab III juga akan menjelaskan secara rinci terkait beberapa indikator serta dimensi dari konsep hegemoni tersebut. Kemudian, setelah mengetahui beberapa indikator dari konsep hegemoni tersebut, maka penulis akan mengaitkan dan menganalisisnya dengan rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu upaya pertahanan hegemoni Amerika Serikat dalam menghadapi dominasi Tiongkok, yaitu dengan memfokuskan pada sektor ekonomi dan militer.